



PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN PATI

Okta Pradita Kusuma Putra*, Amiek Soemarmi, Amalia Diamantina
Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : oktapradita19@gmail.com

ABSTRAK

Dalam mewujudkan pelaksanaan program Pemerintah atau urusan perikanan dalam pengolahan hasil perikanan yang dimiliki daerah guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang usaha perikanan, dinyatakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Hal ini berarti pemerintah daerah (Dinas Perikanan Kabupaten Pati) tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasinya sendiri. Permasalahan yang diteliti ini, adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati, faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat dalam pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berdasarkan data primer dengan cara melakukan wawancara mendalam dan sekunder berupa bahan-bahan pustaka hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dimana hasil dari analisis disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati mempunyai tugas kewenangan melaksanakan berbagai urusan perikanan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati dan membuat program dan strategi yang tepat, sebagaimana hal ini sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati, selain itu berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang Kelautan dan Perikanan. Kewenangan ini merupakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Pati sebagai bentuk pelaksanaan asas desentralisasi pada otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyerahan wewenang ini bertujuan untuk pemberdayaan daerah sebagai proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan sesuai aspirasi masyarakatnya sendiri. Faktor-faktor yang mendukung dalam pengolahan hasil perikanan adalah kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terkait, keamanan yang terjamin, dukungan dari pihak luar pemberi dana, daya beli masyarakat yang membaik, sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah kurangnya kuantitas personil dan kualitas SDM, kurangnya sumber daya dana dan fasilitas, sikap mental dari pelaku usaha kecil yang kurang kooperatif. Saran dari penelitian ini adalah bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan diperlukan kerja sama yang baik antar Dinas/instansi terkait, Pengusaha, pihak penyandang dana usaha, pemerintah pusat.

Kata kunci : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati, Pengolahan Hasil Perikanan

ABSTRACT

In realizing the implementation of government programs or fishery Affairs in the processing of the results of the fishery to support area owned the implementation of regional autonomy, real and responsible being one of the potential that can be developed by local governments in the field of fisheries, the attempt is stated in Act No. 23 of 2014 and attachment to law No. 23 2014. This means local authorities (Fisheries Agency Pati) not only to carry out the provisions of the Centre but making a plan, execute, control, and monitor yourself. The problem is examined, is the implementation of tasks and authorities of the Department of marine and Fisheries Pati in the processing of the results of the fishery in Pati, factors that support and hinder the processing results in fisheries in Pati.

The research method used is the method of empirical juridical approach which is qualitative, descriptive. The collected data based on primary data by way of conducting interviews in depth and secondary form of law library materials which have the force of law. The analysis of the data used is qualitative analysis where the results of the analysis presented in descriptive.

Based on this research obtained the results that the Fisheries Agency and the Maritime Authority has a duty Pati carry out various fisheries Affairs, construction and development of the processing of the results of the fishery in the Starch and makes the program and an appropriate strategy, as it is in accordance with the position, tasks and functions based on local regulations No. 11 in 2008 about the Organization and the Work of the Regional Office of Pati, Pati Regent Rule based Number 29 of 2008 the elaboration, about the duties and functions of the Department of Fisheries and marine Pati has a duty of carrying out the Affairs of local governance based on the principle of autonomy and pembantuan tasks in the field of marine and fisheries. This power is most authority given by the Central Government to the County Government of starch as a form of implementation of the principle of decentralization at the regional autonomy based on Act No. 23 of 2014 on local governance. The handover of authority is aimed at empowering the region as a process of learning and reinforcement for the area to be able to set up, administer and manage the interests and aspirations of its people in accordance of its own. Factors that support in the processing of the results of the fishery is a good cooperation between the various parties concerned, security is assured, the support of parties outside the funder, the improved purchasing power, while the factors that inhibit is the lack of quantity and quality of human resources personnel, lack of resources and funding facilities, the mental attitude of the perpetrator of the small businesses that are less cooperative. Advice from the research is that in doing the coaching and development of processing fisheries needed good cooperation between Department/relevant agencies, employers, funders, the Central Government's efforts.

Key words: Marine and Fisheries Agency Pati Processing of fisheries

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki perairan yang sangat luas dan di dalamnya terdapat pula beraneka ragam sumber daya, yaitu sumber daya perikanan dengan segala jenisnya dan segala macam kekayaan alam lainnya.

Secara geografis, lautan Indonesia yang terletak di daerah katulistiwa dan beriklim tropis ternyata membawa konsekuensi akan kekayaan jenis-jenis maupun sumber

daya perikanan.¹ Ikan, kepiting, udang, kerang, ubur-ubur, termasuk bidang perikanan yang mudah diperoleh dengan alat yang sederhana. Dari segi prospeknya, perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek. Bukan saja dari segi teknis dan peralatan

¹ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002) hlm 1

penangkapan ikan saja yang ditingkatkan, melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Keberadaan sumber daya perikanan terbilang sangat banyak baik dari segi kuantitasnya maupun beraneka ragam jenisnya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pengelolaan usaha perikanan sangat beragam, mulai dari usaha menangkap ikan dan membudidayakan ikan, termasuk didalamnya bermacam-macam kegiatan seperti menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya yang bertujuan untuk mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi nelayan. Dari usaha perikanan salah satu yang diharapkan yaitu memperoleh keuntungan.

Dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada pasal 3

dinyatakan pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: a). Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, b). Meningkatkan penerimaan devisa negara, c). Mendorong perluasan dan kesempatan kerja, d). Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, e). Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, f). Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, g). Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan, h). Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal, i). Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang. Menyadari begitu luasnya wilayah perairan, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk memberikan sebagian pengelolaan wilayah perairan ke pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota dalam menjalankan otonomi seluasnya-luasnya, kecuali urusan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, dalam Pasal 18A Ayat (2) menyatakan bahwa “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”, karena itu dalam Pasal 18 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kewenangan tersebut, dimana dalam Ayat (1) menyebutkan bahwa “daerah yang memiliki wilayah laut diberikan

kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut”.

Sementara itu Pasal 14 ayat (1), (2), dan Penjelasan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan wajib dan pilihan yang didesentralisasikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak disebutkan adanya Pengelolaan urusan/Pelabuhan Perikanan. Dalam urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Meliputi Kewenangan Pemerintah Dalam Mengelola Laut. Selain itu, adanya perbedaan sifat pemberian kewenangan dalam urusan perikanan, jika dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bersifat Desentralisasi maka dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bersifat Pembantuan.

Sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai pembagian urusan bidang kelautan kabupaten/kota hanya diberikan kewenangan dalam perikanan tangkap, serta dalam hal perikanan budidaya. Tetapi Pasal 18 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan terhadap daerah dalam pengelolaan laut, begitu juga dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memberikan kewenangan terhadap pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengesahaan sumber daya kelautan dengan

menggunakan prinsip ekonomi biru. Menurut lampiran Undang-Undang No 23 Tahun 2014, terdapat juga pembagian urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pilihan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang salah satunya mengenai kelautan dan perikanan.

Kabupaten Pati sendiri, dalam kegiatan yang berhubungan dengan perikanan digolongkan ke dalam sektor pertanian. Berdasarkan data BPS Kab. Pati tahun 2012, subsektor perikanan menyumbang 5,12% dari 35,92% sumbangan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati. Dengan sumbangan tersebut, subsektor perikanan menjadi penyumbang terbesar kedua setelah subsektor tanaman bahan makanan untuk sektor pertanian. Dengan demikian, subsektor ini memiliki peran yang cukup besar terhadap pemasukan daerah di Kabupaten Pati.

Komoditas yang dicakup dalam subsektor perikanan adalah semua hasil kegiatan perikanan laut, perairan umum, tambak, kolam sawah, dan karamba.² Tetapi tidak semua jenis perikanan ini menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Pati. Jenis perikanan yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Pati adalah komoditas perikanan budidaya tambak dan perikanan laut tangkap. Sedangkan untuk jenis

² BPS Kab. Pati, 2012

perikanan perairan umum, kolam sawah, dan karamba belum menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Pati.

Untuk membangkitkan kembali komoditas produk unggulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, untuk menjalankan kewenangannya atas komoditas produk unggulan Kabupaten Pati, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang Kelautan dan Perikanan.

Sehubungan dengan pengolahan hasil perikanan merupakan upaya untuk mendapatkan nilai tambah dari bahan baku ikan. Kegiatan tersebut sudah lama berjalan di kabupaten Pati dengan berbagai bentuk olahan ikan antara lain : pindang ikan, ikan asin, baso ikan, abon dan nugget ikan. Pada pelaksanaan pengolahan hasil perikanan, diperlukan penguatan modal dalam rangka memudahkan distribusi pemasaran hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan lokal, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Pati dalam mengembangkan program SPG (Sarana Pemasaran Bergerak) dengan jenis kendaraan roda dua. Selain itu, Dinas Perikanan dan Peternakan juga telah melakukan kegiatan pemberdayaan untuk pelaku pengolahan antara lain dalam bentuk : Pelatihan, bekerjasama dengan Balai Pendidikan Pelatihan Perikanan Pati, Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perikanan Jawa Tengah. Diharapkan

dengan berjalannya dan meningkatnya program-program di berbagai bidang/sector, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Pati bisa meningkat, serta pemerataan pembangunan di daerah-daerah bisa tercapai sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik suatu masalah hukum yang menarik untuk dikaji secara ilmiah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati ?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati ?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.³

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari semua pihak yang terkait meliputi di Dinas Perikanan, pengusaha, nelayan, dan petani tambak. Sedangkan data sekunder merupakan data yang mendukung sumber data primer berupa data dari

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm 97-98

buku-buku, literatur, peraturan-peraturan dan lain-lain.

Analisis data yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, yaitu "Segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh".⁴ Analisa data dilakukan dengan beberapa tahapan yakni setelah data terkumpul kemudian diolah dengan mereduksi data, dan ditarik dalam sebuah kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Perikanan dan Kelautan Dalam Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Pati

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengelola dan mengolah potensi daerahnya masing-masing dengan tujuan memajukan daerah dan mengembangkan daerah baik dari sektor perdagangan, budaya, pariwisata, pendidikan, ekonomi dan lain-lain agar warga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.

Demikian pula perihal Ketentuan pengelolaan laut diatur di dalam Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2014. Pengelolaan sumber daya di laut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah Provinsi. Hal ini tentu saja menggeser kewenangan serupa yang ditentukan oleh UU Nomor 32 Tahun

2004 yang membagi antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota.

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan pembagian urusan ini dikenal sebagai Lima 5 (lima) urusan absolut yang menjadi kewenangan pusat,⁵ sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat) diatur melalui lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut M. Ali Safa'at, mengemukakan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 dilengkapi dengan lampiran daftar pembagian kewenangan urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Hal ini menegaskan bahwa teori *reside* tidak dianut lagi, selain 5 (lima) urusan absolut yang menjadi wewenang pemerintah pusat tidak berarti menjadi wewenang daerah.⁶

Jika melihat keseluruhan pembagian wewenang dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 ini, paling banyak kewenangan dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah provinsi. Bahkan ada beberapa urusan di mana daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan sama sekali, baik Urusan Kelautan, Pesisir dan Pulau

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), halaman 242

⁵ Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan dikenal dengan istilah teori residu.

⁶ Muchamad Ali Safa'at, *Op. cit*, hlm 9

Terpencil, daerah kabupaten/kota tidak memiliki wewenang. Kabupaten/kota hanya memiliki urusan bidang perikanan tangkap untuk pemberdayaan nelayan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).⁷

Pembangunan perikanan Indonesia dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yakni perikanan laut dan perikanan darat termasuk didalamnya kegiatan penangkapan dan kegiatan budidaya. Kenyataan menunjukkan bahwa aktivitas perikanan telah lama digeluti oleh sebagian rakyat dalam skala usaha yang relative kecil utamanya nelayan dan petani tambak. Hal tersebut tentunya harus mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah agar nelayan dan petani tambak yang ada di daerah dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Meski demikian potensi yang ada di Kabupaten Pati belum dimanfaatkan optimal dan masih banyak komoditas unggulan yang belum teridentifikasi sehingga output yang ada belum diolah secara optimal sehingga produktivitas komoditas unggulan sebenarnya masih dapat lebih ditingkatkan. Komoditas unggulan adalah suatu komoditas yang potensial untuk dikembangkan di suatu daerah dengan memanfaatkan sumberdaya setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Pati merupakan salah satu alasan yang cukup bahwa banyak masyarakat Kabupaten Pati yang

menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian terutama mengenai pengolahan dan pemasaran ikan.

Pengolahan Perikanan adalah upaya yang dilakukan terhadap sumber daya ikan secara tradisional maupun modern, baik secara fisika, kimia, mikrobiologis atau kombinasinya, untuk dijadikan produk akhir yang dapat berupa ikan segar, ikan beku dan bentuk olahan lainnya, guna mengawetkan dan memperbaiki penampakan/penampilan sifat-sifat fisika, kimia dan nilai gizi serta nilai tambahnya untuk memenuhi konsumsi manusia.

Beberapa jenis proses pengolahan ikan yang ada di Kabupaten Pati yaitu pembekuan, penggaraman, pengasapan, pemindangan dan pelumatan daging. Beragamnya jenis proses pengolahan ikan tersebut menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dalam usaha pengolahan ikan.

Tabel 4.8. Potensi Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2014

Sektor	Produksi (kg)/Tahun	Jumlah Pekerja (org)
Perikanan Tangkap	16.143.026	6615
Perikanan Budidaya	36.506.891	1500
Produk olahan	8.103.816	6412
Pemasaran	1.913.530	2943

Statistik diatas menunjukkan besarnya hasil perikanan menjadikan Kabupaten Pati salah satu terbesar dalam bidang perikanan tangkap dan budidaya di Provinsi Jawa Tengah dengan potensi sebesar itu dan lebih dari 17.000 orang bermata pencaharian dibidang perikanan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dituntut agar bisa mempertahankan dan meningkatkan hasil perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah.

⁷ *Ibid*, hlm 9-10

Suatu keberhasilan suatu instansi pemerintah tercermin dari terlaksananya setiap tugas dan fungsi dengan baik sehingga apa yang dijabarkan dalam Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati itu dapat terwujud. Dengan adanya perhatian yang serius dari Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Pati maka ketersediaan kebutuhan dari masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi khususnya bagi masyarakat nelayan.

Secara umum pelaksanaan tugas dan wewenang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten pati digambarkan melalui Visi dan Misi yang hendak dicapai yaitu, "Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang lestari dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat (Visi), serta "Meningkatnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang optimal dan berkelanjutan (Misi). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang berfungsi melaksanakan berbagai urusan Usaha perikanan diharapkan mampu membuat program dan strategi yang tepat untuk pengolahan dan pemasaran Bidang Usaha Perikanan yang ada di Kabupaten Pati, sebagaimana hal ini sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati.⁸

⁸ Pasal 47, 48, dan 49 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati

Selain itu berdasarkan Peraturan Walikota Pati Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Walikota Pati bagian Keenam Pasal 25 Dinas Kelautan dan Pertanian, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, terutama didalam tugas Sub Bidang perikanan, adalah Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Pengembang Usaha dan Teknologi, Sarana dan Prasarana serta Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan. Oleh karena itu, peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati diharapkan mampu menjawab permasalahan dan mengembangkan usaha hasil pengolahan perikanan menjadi komoditas unggulan di daerah Kabupaten Pati.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peran atau tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mempunyai peranan yang penting dan mempunyai wewenang strategis dalam melakukan pembinaan dan pengembangan nelayan atau petani tambak. Adapun peran atau tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan membina dan mengembangkan usaha nelayan atau petani tambak yang mandiri, antara lain:⁹

⁹ Triyani SE, selaku Seksi pengolahan dan pemasaran Bidang Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Wawancara, pada tanggal 3 Juli 2016

- a. Dengan memberikan bantuan peralatan kepada pelaku usaha mandiri;
- b. Pengembangan pemasaran usaha mandiri, pembinaan dan pelatihan dalam pengolahan ikan sampai pemasaran yang berkualitas baik;
- c. Menumbuh kembangkan usaha nelayan atau petani tambak;
- d. Pengembangan daya saing sektor hasil perikanan, sehingga diharapkan komoditas sector keunggulan hasil perikanan mampu bersaing di pasar global dan mandiri sehingga mampu meningkatkan volume ekspor daerah;
- e. Sebagai fasilitator, mediator, dan inovator terhadap pemberdayaan nelayan atau petani tambak.

Di dalam pengembangan nelayan atau petani tambak tentunya tidak terlepas dari peranan Dinas Kelautan dan Perikanan, dimana didalam pelaksanaannya tentu ada pembinaan yang dilakukan. Dengan adanya pembinaan diharapkan kepada para nelayan atau petani tambak bisa memahami dan mengembangkan pengolahan hasil perikanan mereka dengan baik.

Pembinaan terhadap nelayan atau petani tambak yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan hanya dilakukan sebulan sekali dan terkadang lebih dari sebuah kegiatan pembinaan itu diadakan lagi terhadap pelaku usaha, nelayan atau petani tambak yang ada di Kabupaten Pati, pembinaan-pembinaan yang dilakukannya berupa mengadakan pembinaan dan penyuluhan

mengenai pengolahan hasil perikanan yang dilakukan oleh pakar usaha perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sedangkan pelatihan para pelaku usaha, nelayan atau petani tambak diambil beberapa pengusaha untuk dilakukan pembinaan dan pelatihan.¹⁰ Dengan adanya pembinaan-pembinaan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan para pengusaha, nelayan atau petani tambak bisa memahami dan mengembangkan usahanya dan diharapkan dengan adanya pembinaan olahan hasil perikanan nantinya mereka menjadi usaha dalam skala besar.

B. Faktor Yang Mendukung dan Yang Menghambat Dalam Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Pati

Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan kegiatan pembinaan perihal olahan hasil perikanan tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kegiatan pembinaan dan pengembangan olahan hasil perikanan. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi pendukung maupun penghambat dalam usaha pembinaan usaha pengolahan hasil perikanan.

1. Faktor-faktor Pendukung

- a. Kerjasama yang baik Dinas Kelautan dan Perikanan dengan semua pihak yang terkait dalam pembinaan dan pengembangan olahan hasil perikanan

¹⁰ Triyani SE, selaku Seksi pengolahan dan pemasaran Bidang Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Wawancara, pada tanggal 3 Juli 2016

Dinas Kelautan dan Perikanan saling bahu-membahu dalam satuan kerja untuk memberikan pembinaan usaha kecil sebaik mungkin. Aparat Dinas Kelautan dan Perikanan saling bekerjasama dalam membuat rancangan kegiatan pembinaan yang akan dilakukan. Aparat saling bekerjasama untuk mensukseskan kegiatan yang akan dilakukan baik itu kegiatan pelatihan, pemberian pinjaman modal.

Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahan hasil perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan perlu kerjasama yang baik dengan masyarakat, seperti dengan para pengusaha yang telah berhasil maupun dengan instansi-instansi terkait. Selama ini kerja sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan para pengusaha yang telah berhasil tidak mengalami permasalahan, pengusaha yang telah berhasil selalu bersedia dan menyempatkan waktunya untuk diminta menjadi nara sumber atau pemateri dalam pelatihan mengenai pembinaan dan pengembangan olahan hasil perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan olahan hasil perikanan mengajak kerjasama dengan instansi-instansi terkait baik instansi pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan usaha perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan instansi-instansi yang terkait yang diajak kerjasama saling

menyatupadukan tugas-tugas yang akan dilakukan sehingga tidak terjadi kesamaan tugas yang akan dilaksanakan dari masing-masing pihak yang terlibat.

b. Lingkungan Ekstern

Suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari pengaruh luar dalam mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembinaan tidak terlepas dari pengaruh kondisi atau keadaan di lingkungan luarnya. Adanya pengaruh dari lingkungan luar tersebut dapat berdampak terhadap tercapainya tujuan dari kegiatan-kegiatannya sehingga mempengaruhi keberhasilan dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatannya. Lingkungan luar tersebut meliputi:

1) Keadaan keamanan yang terjamin

Keadaan keamanan mempunyai hubungan yang erat dengan pemasaran suatu produk, apabila keadaan keamanan yang terjadi pada saat itu tidak nyaman mengakibatkan keengganan konsumen untuk mendatangi tempat usaha dan sebaliknya jika keadaan keamanan dapat terjamin maka akan terjamin rasa kenyamanan bagi konsumen.

2) Dukungan dari pihak luar pemberi dana

Keberadaan pengolahan hasil perikanan punya hubungan yang erat dengan pihak luar yaitu piha-pihak yang

mempunyai perhatian terhadap pengembangan olahan hasil perikanan, dalam hal ini pihak-pihak yang dapat memberikan pinjaman dana. Untuk itu upaya Dinas Perikanan adalah dengan mencarikan dana pinjaman modal. Dinas Perikanan mengalami kemudahan dalam memberikan pinjaman dana kepada pengusaha, petani tambak. Banyak lembaga yang mau memberikan pinjaman dana. Yang menjadi masalah bagi pelaku usaha kecil, nelayan dan petani tambak adalah dalam proses dan prosedur dalam mendapatkan pinjaman dana tersebut. Mengenai syarat studi kelayakan bagi pelaku usaha kecil, nelayan dan petani tambak sebagai syarat permohonan modal dengan bunga rendah ke lembaga keuangan seperti Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Hal ini dapat di atasi oleh Dinas Perikanan dengan pelatihan tentang manajemen pengelolaan keuangan, studi kelayakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan modal usaha yang diberikan oleh lembaga pemberi pinjaman.

3) Keadaan masyarakat (daya beli masyarakat yang membaik)

Keadaan ekonomi yang semakin membaik akhir-akhir ini mengakibatkan daya beli masyarakat juga semakin meningkat.

2. Faktor-faktor Penghambat

a. Kualitas Sumber Daya Manusia dan kuantitas Dinas Kelautan dan Perikanan yang masih kurang memadai

Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahan hasil perikanan, Dinas Perikanan dihadapkan pada permasalahan internal yang ada. Masalah tersebut adalah keterbatasan kuantitas dan keterbatasan kualitas SDM dari aparat Dinas Perikanan. Jumlah aparat yang sedikit dibandingkan jumlah pelaku usaha yang jumlahnya banyak. Selain keterbatasan jumlah staf, diantara staf pelaksananya tersebut masih ada yang pendidikannya hanya tingkat SMA, meskipun ada yang lulusan sarjana, sehingga dalam memberikan pembinaan pun akan dapat kurang maksimal karena tingkat pengetahuan yang terbatas tetapi karena masa kerjanya yang sudah lama sehingga mereka mempunyai banyak pengalaman kerja dalam melakukan pembinaan diharapkan pengalaman kerja yang dimilikinya ini mereka dapat mengambil pelajaran dari pengalaman - pengalaman pembinaannya selama ini. Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahan hasil perikanan dibutuhkan seorang pematani yang kompeten di bidang usaha perikanan sebab olahan hasil perikanan bersinggungan dengan banyak disiplin hukum yang harus dipahami petugas tersebut.

b. Sumber daya dana dan fasilitas

Dana yang dimiliki Dinas Perikanan baru dapat mencukupi untuk jumlah dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah pelaku usaha yang akan diikutsertakan sangat tergantung dari jumlah dana yang dimiliki sehingga bila dananya kecil maka jumlah kegiatan dan jumlah pelaku usaha yang diikutsertakan menjadi terbatas. Dari sumber dana yang terbatas inilah dapat menurunkan hasil kerja Dinas Perikanan.

c. Sikap mental dari pelaku usaha, nelayan, petani tambak yang menganggap kurang penting pembinaan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

IV. SIMPULAN

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati dan Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Bupati Pati bagian Keenam Pasal 25 Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang

Kelautan dan Perikanan. Kewenangan tersebut sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam pengolahan hasil perikanan dapat diketahui dari strategi kebijakan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pengusaha, nelayan maupun petani tambak, setelah tahu permasalahan yang dihadapi kemudian langkah yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi permasalahan tersebut diprioritaskan pada permasalahan yang paling mendesak terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemecahan permasalahan yang berwujud pembinaan, pelatihan ketrampilan manajerial, pengembangan sumber daya manusia, memfasilitasi permohonan modal usaha, setelah itu dilakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan. Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pihak peminjam dana usaha, Pemerintah Pusat, Pengusaha yang telah berhasil.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat dalam

pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati

a) Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dalam pembinaan industri kecil, meliputi: Kerjasama yang baik antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dengan Pengusaha kecil, Pihak penyandang dana usaha; Lingkungan ekstern yang meliputi: keadaan keamanan yang terjamin, dukungan dari pihak luar pemberi dana, keadaan masyarakat (daya beli masyarakat yang membaik).

b) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dalam pembinaan industri kecil, meliputi: 1) Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kuantitas aparat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang yang kurang memadai; 2) Sumber daya dana dan fasilitas untuk peningkatan pengetahuan dan keahlian usaha kecil/ industri kecil yang masih kurang; 3) Sikap mental dari pengusaha kecil cepat merasa puas atas usaha yang digelutinya dan menganggap kurang penting pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.

a. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati, meliputi: Kerjasama yang baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Pengusaha, nelayan maupun petani tambak, Pihak penyandang dana usaha; Lingkungan ekstern yang meliputi: keadaan keamanan yang terjamin, dukungan dari pihak luar pemberi dana, keadaan masyarakat (daya beli masyarakat yang membaik).

b. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengolahan hasil perikanan, meliputi : 1) Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kuantitas aparat Dinas Kelautan dan Perikanan yang kurang memadai; 2) Sumber daya dana dan fasilitas untuk peningkatan pengetahuan dan keahlian Pengusaha, nelayan maupun petani tambak, yang masih kurang; 3) Sikap mental dari Pengusaha, nelayan maupun petani tambak, yang cepat merasa puas atas usaha yang digelutinya dan menganggap kurang penting pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

V. DAFTAR PUSTAKA**Buku-Buku**

- Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- C.S.T. Kansil, 2002. *Pemerintahan Daerah Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Hanif Nurcholis, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT. Grasindo.
- H. Supriadi dan Alimuddin. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- HAW. Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marhaeni Ria Siombo. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- M. Ghufrani H. Kordi K. 2010. *Ekosistem Terumbu Karang*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- M. Dimiyati Hartono. 1983. *Hukum Laut Internasional Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai Negara Nusantara*. Bandung: Bina Cipta.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Penerbit PT. Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press.
- Siswanto Sunarno, 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati.

Internet/Website

- BPS Kab. Pati, 2012. Pati dalam Angka 2011. Komoditas perikanan di Kabupaten Pati, dalam <http://litbang.patikab.go.id/index.php/2016-02-07-13-44-28/jurnal/item/186->, diakses pada tanggal 20 April 2016
- Muchamad Ali Safa'at, Sentralisasi Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dikutip dalam <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2016/06/>, pada tanggal 22 Agustus 2016
- <http://patikab.bps.go.id> "kontribusi PDRB di Kabupaten Pati, 2 Juli 2016
- Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pati, dikutip dalam



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.pati/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2016